

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSAT, UKURAN LEGISLATIF, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH)

M. Zahrul Fuadi¹, Jhon Andra Asmara^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: zfuadi1996@gmail.com¹, jhon.andra@unsyiah.ac.id²

* Corresponding Author

Abstrak

This study aims to see the influence of regional distribution characteristics, legislative measures, and audit findings against the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report. The population that used in this study is the District and Urban District Government in Aceh Province during 2015-2017. This study uses purposive sampling techniques, so the selection of samples is done by according to specific considerations or goals. The independent variables examined in this study are regional government size, regional independence, intergovernmental revenue, legislative measures, and audit findings. The dependent variable is the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report. The type of data used in this study is secondary data. The analysis used in this study is multiple linear regression. The data is processed by using the SPSS software test tool. The results showed that variables of regional government size, regional independence, intergovernmental revenue, legislative measures, and audit findings have positive affect on the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report. Partially, intergovernmental revenue and audit findings have negative affect on the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report, while regional government measures, regional independence and legislative measures have no significant effect on the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report.

Keywords: *regional government size, regional independence, intergovernmental revenue, legislative measures, audit findings, the level of disclosure of Preliminary Unaudited Regional Government Financial Report*

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah hal yang paling menonjol dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik sekarang ini. Tata pemerintahan yang benar terkait erat atas bagaimana pemerintah itu dapat menjalankan otonomi di daerahnya. (Maulana & Handayani, 2015). Pemerintahan yang baik erat hubungannya dengan bagaimana pemerintahan itu mampu menjalankan otonomi di daerahnya. Bentuk konkret untuk mengupayakan tata pemerintahan yang baik, serta peningkatan akuntabel dan transparansi dalam manajemen finansial publik, pemerintah yang berkedudukan di pusat dan di daerah harus menyerahkan LK sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

UU tentang pemda No. 23 tahun 2014, yang saat ini diubah dengan UU No. 9 tahun 2015, menyatakan bahwasanya setiap pemerintah, provinsi, dan kabupaten maupun kota, harus menyusun laporan pertanggungjawabannya secara mandiri. UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara juga menerangkan bahwasanyasanya presiden, gubernur, bupati dan walikota wajib membuat dan menyajikan laporan tentang tanggung jawab untuk melaksanakan APBN / APBD dalam bentuk laporan keuangan (LK) yang berisi laporan pelaksanaan APBN atau APBD, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwasanya penyajian laporan pertanggung jawaban

pusat dan daerah harus sama seperti yang tertera pada SAP yang berlaku. Karena itu, SAP sangat penting dan dibutuhkan untuk dijadikan bahan referensi dan instruksi untuk penyajian Laporan Keuangan tersebut. LK pemerintah yang menjadi output wajib mematuhi SAP.

Tingkat penyajian standar akuntansi terhadap LKPD masih relatif rendah, hal ini berdasarkan studi studi yang dilakukan sebelumnya yakni 35,45% oleh Liestiani (2008), 22% oleh Lesmana (2010), 52,09% oleh Syafitri (2012), 58,46% oleh Pandasari (2016), 52,74% oleh Ratnasari (2016) dan Simbolon (2017), yang rata-rata penyajian wajib hanya 38,32%. Ini memperlihatkan bahwasanyasanya Pemerintah daerah (pemda) tidak mengungkapkan keseluruhan dari item yang harus diungkapkan didalam Laporan Keuangannya. Penyajian LKPD yang relatif rendah, ikut memengaruhi pendapat auditor, yang kemudian disampaikan oleh BPK RI. Berdasarkan pengecekan untuk semester pertama tahun 2018 (IHPS I), BPK RI melakukan audit sebanyak 542 LKPD 2017. BPK memberikan untuk 411 (76%) LKPD berupa opini WTP, 113 (21%) LKPD beropini WDP, dan sebanyak 18 (3%) LKPD beropini TMP. (Sumber: IHPS BPK Semester I Tahun 2018). Beberapa LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP ini dikarenakan masih terdapat kekurangan atas pengungkapan LK yang belum sesuai dengan SAP yang berlaku.

Maulana & Handayani (2015) meneliti tentang dampak karakteristik, kompleksitas pemerintah juga audit findings pada tingkat penyajian wajib LKPD. Studi menunjukkan variabel ukuran pemda berpengaruh positif, hasil tersebut di dukung dengan penelitian yang dijalankan Susbiyani (2014), tetapi penelitian ini tidak searah dengan yang dilakukan Lesmana (2010) yang mengatakan bahwasanya ukuran pemda tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Demikian pula variabel ukuran legislatif mempunyai pengaruh yang baik pada level penyajian LK, tetapi studi ini tidak searah seperti studi yang dilaksanakan oleh Sumarjo (2010), yang memberi paparan bahwasanya jumlah anggota DPRD tak memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

Ratnasari (2016) melakukan studi, guna mengetahui variabel apa saja yang memberi pengaruh pada tingkat penyajian LKPD di Kabupaten / Kota,

hasil studi menunjukkan bahwasanya variabel kemandirian daerah tidak mempengaruhi tingkat penyajian, studi ini serasi dengan penelitian Setyaningrum & Syafitri (2012) tapi bertolak dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Suhardjanto & Lesmana (2010). Berbeda dengan variabel intergovernmental revenue, yang menunjukkan hasil positif, hasil studi ini serasi dengan studi Feriyanti et al (2015), tetapi bertentangan dengan studi Hilmi & Martani (2012); Hendriyanti dan Tahar (2015); dan Setyowati (2016). Variabel independent lainnya yang juga menimbulkan pendapat berbeda adalah temuan audit.

Studi ini menarik dilakukan karena belum ada studi yang cukup tentang penyajian laporan di sektor publik karena sulitnya memperoleh info dan data yang dibutuhkan dan rahasia, dan motif yang mendasari pengungkapan tersebut biasanya susah dikembangkan. Studi ini penting dilakukan sebagai alat untuk menilai serta mengukur tingkat penyajian yang dilakukan pemda sudah sejauh mana.

Berdasarkan fenomena dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, pendapatan transfer, ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh secara simultan atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
4. Apakah penerimaan dari pemerintah pusat berpengaruh secara parsial atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
5. Apakah ukuran legislatif berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
6. Apakah temuan audit berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

di Provinsi Aceh?

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori *Stewardship* dalam Pemerintahan

Stewardship theory dan Agency theory ialah dua teori yang tidak bisa dipisahkan dari praktik good governance terkait tingkat penyajian (Daniri, 2005). Jika didalam teori agensi menggambarkan korelasi antar principal dan agen maka didalam teori stewardship diperjelaskan korelasi antar principal (pemberi amanah) dan steward (penerima amanah). Theory stewardship ialah teori yang menggambarkan kondisi manajer tidak mempunyai motivasi untuk tujuan-tujuan yang bersifat pribadi seperti materi dan uang (Raharjo, 2007).

Steward berusaha untuk mencapai tujuan sasaran dari organisasi, maka dari pada itu steward tidak akan meninggalkan institusinya atau organisasinya. Sehingga korelasi yang terjadi antar principal dan steward, berupa korelasi antara masyarakat dan pmda terangkai akibat adanya karakter manusia yang bisa diberi amanah, bisa bekerja dengan tanggungjawab, memiliki kredibilitas, dan integrity berkenaan pihak lainnya (Sari, 2013). Masyarakat yakin bahwasanyasanya pemerintah yang mereka pilih akan bertanggungjawab memenuhi hak mereka dan bertindak sesuai dengan kewajibanya yang mendasar pada peraturan daerah yang relevan. Pemerintah dalam hal ini ialah pihak yang mempunyai lebih banyak info dari pada masyarakat, sehingga pemerintah harus mempunyai kesadaran penuh dalam meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam menyajikan LK yang selaras terhadap standar dan kaidah yang berlaku sebagai cara konkrit pertanggung jawaban terhadap amanah yang diberi kepadanya..

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintahan diwajibkan menyajikan Laporan keuangan (LK) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang diwakili DPRD atas penggunaan keuangan daerah atau kegiatan operasional. Pelaporan keuangan ialah cara mentransmisikan informasi mengenai keuangan terhadap pihak yang mempunyai kepentingan, terutama yang berada diluar lembaga pemerintah dengan tujuan melaporkan kinerja selama periode

berjalan.

LKPD ialah hasil penggabungan dari keseluruhan LK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). LKPD paling terlambat disusun sesudah tiga bulan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, pada hal ini PPKD menjadi pihak bertanggungjawab atas penyusunan LKPD. Peraturan Pemerintah mengatur bahwasanya penyusunan dan penyajian LKPD haruslah sesuai SAP yang berlaku. Nantinya LKPD yang dikirimkan kepada BPK untuk diperiksa haruslah memuat ikhtisar pencapaian kinerja dan LK daerah. LKPD yang sudah melalui proses pemeriksaan kemudian diserahkan kepada DPRD untuk diulas dan ditentukan sesuai dengan peraturan daerah mengenai akuntabel pelaksanaan APBD

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan berarti tidak ada penutup/penyembunyian. Jika penyajian terkait dengan LK, penyajian berarti bahwasanya LK harus mengandung penjelasan serta informasi yang memadai mengenai kinerja elemen bisnis. (Khasanah & Rahardjo, 2014). Menurut Suhardjanto & Lesmana, (2010) Laporan Keuangan merupakan pertanggungjawaban kepada publik haruslah menerangkan keadaan komprehensif kegiatan operasi, arus kas, posisi keuangan, serta klarifikasi atas pos pos laporan. Berdasarkan fakta bahwasanya publik mempunyai hak mengetahui terbuka atas pertanggung jawaban pemerintah terkait penggunaan anggaran serta sumber daya lainnya yang dipercayakan dan kepatuhan terhadap UU, sehingga diperlukanya transparansi untuk penyediaan informasi yang jujur dan terbuka. Tujuan dari penyajian secara umum ialah memberikan info yang dianggap diperlukan untuk menggapai tujuan LK dan memberi layanan sebagian pihak dengan berbagai pentingan Standar Akutansi Pemerintah ialah persyaratan yang mempunyai payung hukum, maka melakukan penyajian yang sesuai standar akuntansi merepresentasikan kepatuhan atas hukum. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu bagian terpenting didalam sebuah LK pemerintah, yang dimana memuat informasi mengenai peraturan akutansi yang

dipakai lembaga pelaporan dan info lainnya yang diwajibkan untuk disajikan pada SAP serta ungkapan-ungkapan yang dibutuhkan untuk memberi hasil pengungkapan LK.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Pemerintah Daerah

Banyak studi mengkonfirmasi bahwasanya ukuran instansi secara signifikan mempengaruhi susunan institusinya. Pemda yang besar umumnya lebih dikenal oleh khalayak umum, dan sebagai perwujudan akuntabel publik, salah satunya ialah penyajian info tambahan untuk meminimalisir biaya agen. (Lesmana, 2010).

Besarnya jumlah aset suatu daerah, akan semakin besar juga ukuran pemerintahan tersebut. Besarnya ukuran pemerintahan akan mendorong pemerintahan daerah tersebut untuk melakukan penyajian informasi keuangan secara lengkap, selainnya itu ukuran pemerintah yang besar biasanya semakin diketahui oleh publik serta memiliki manajemen financial yang kompleks sehingga pemerintahan mendapatkan kontrol yang lebih ekstra terkait transparansi dan akuntabel. Penelitian yang sebelumnya Maulana dan Handayani (2015) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah menggambarkan kesanggupan pemerintahan tersebut untuk mendanai sendiri berbagai kegiatan pemerintahannya kepada publik yang sudah bayar pajak serta retribusi sebagai sumber pemasukan yang dibutuhkan daerah. Perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah dapat menggambarkan kemandirian suatu daerah (Imawan, 2014).

Tingginya PAD menggambarkan rasio kemandirian yang semakin tinggi juga, besarnya PAD menunjukkan semakin tingginya kontribusi publik untuk pembayaran pajak dan retribusi. Alhasil diikuti dengan meningkatnya tekanan terhadap pemda untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel. Transparansi dan akuntabel bisa diwujudkan salah

satunya dengan LKPD. Tingginya kemandirian suatu daerah, akan makin besar juga tuntutan bagi pemda dalam melaporkan penyajian didalam LKPD.

H2 : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

Penerimaan Dari Pemerintah Pusat

Suatu pemerintahan dengan penerimaan dari pemerintah pusat yang besar menunjukkan bahwasanya pemda tersebut memiliki taraf ketergantungan keuangan terhadap pemerintahan pusat dalam mendanai kegiatan yang dijalankan oleh pemda. Hal ini mengakibatkan pemerintah pusat meminta penyajian lebih sebagai cara mengawasi kinerja pemda dalam pemakaian dana tersebut, sehingga pemda akan terdorong untuk menaikkan transparansi keuangan yang didapat dalam rangka mewujudkan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat, serta menunjukkan ketaatan atas peraturan yang berlaku. Ratnasari (2016), dalam studinya menemukan korelasi positif terhadap tingkat penyajian, alhasil besarnya taraf ketergantungan akan diikuti dengan semakin besarnya taraf penyajian yang dilaksanakan oleh pemda.

H3 : Penerimaan dari Pemerintah Pusat berpengaruh positif atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah Lembaga yang mewakili masyarakat, DPRD mengawasi pemda sehingga dapat mengelola anggaran untuk dapat digunakan dengan benar. Suhardjanto & Yulianingtyas (2011), menyebutkan bahwasanya legislatif merupakan Lembaga yang memiliki kapasitas juga peran strategis untuk mengawasi financial daerah. Studi Setyaningrum & Syafitri (2012) menunjukkan bahwasanyasanya jumlah legislatif memberikan pengaruh positif atas tingkat penyajian, dengan ini menunjukkan andil DPRD dalam mengawasi financial berjalan benar sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah. Semakin banyaknya anggota legislatif diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap pemda.

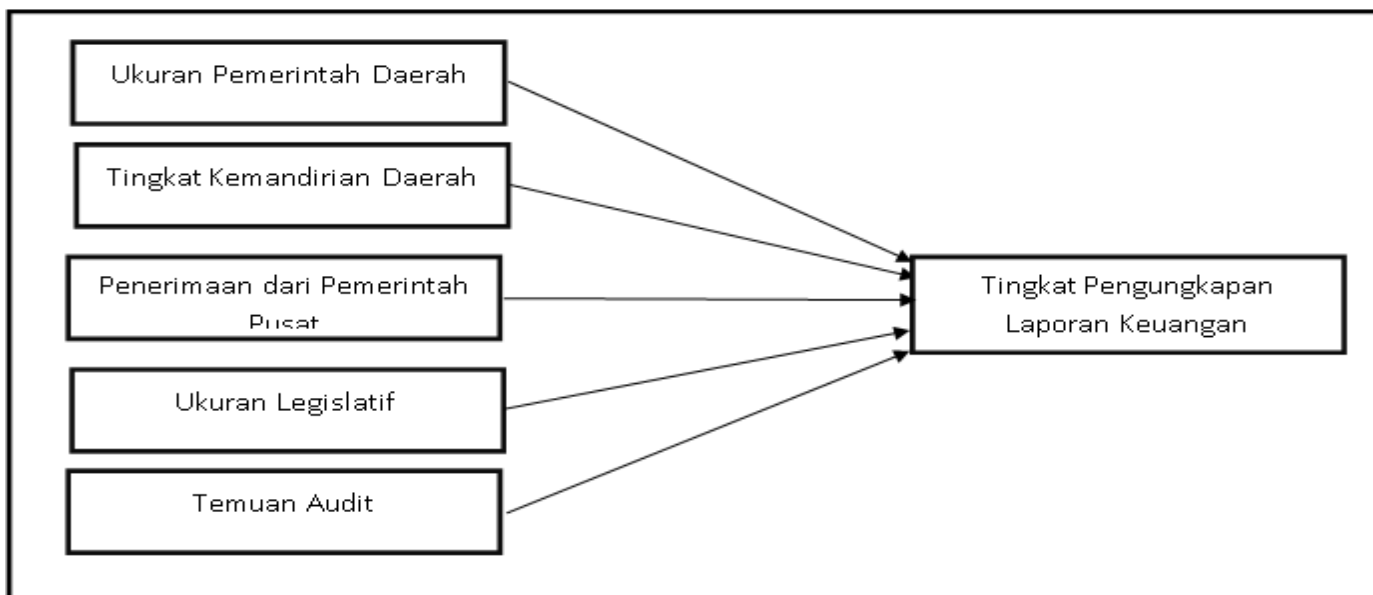
H4 : Ukuran Legislatif berpengaruh positif atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

Temuan Audit

Temuan Audit adalah kasus yang ditemui oleh BPK terhadap LK pemda atas pelanggaran. Temuan mengakibatkan BPK meminta dilakukannya peningkatan pengungkapan serta pelurusan atas LKPD. Penyajian lebih dilaksanakan sebagai langkah untuk perbaikan dan pelurusan atas temuan dan menunjukan kepada masyarakat terdapatnya perbaikan

kualitas yang dilakukan pemda. Jadi semakin besarnya temuan maka semakin besar juga jumlah tambahan penyajian yang akan dimintai oleh BPK.

H5 : Temuan Audit berpengaruh positif atas tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah



3. Metode Penelitian

Populasi Sampel

Populasi studi ini ialah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Aceh dengan lingkup waktu 2015-2017 dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Aceh ialah berjumlah 23 pemda, 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota. Studi ini memakai Teknik purposive sampling dalam memilih sampel, maka didalam pemilihan sampel memakai pertimbangan tertentu. Kriteria-kriteria atau pertimbangan yang digunakan adalah:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2015-2017 yang sudah di audit oleh BPK dan mendapat opini WTP.
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel.
 - 1) Menyediakan data berupa komponen utama laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 2) Menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2015-2017 pada Daerah Dalam Angka (DDA) masing-masing daerah pemerintahan atau melalui situs resmi Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berhasil didapat dari BPK berjumlah 69, Dari 69 laporan keuangan terdapat 4 laporan keuangan yang tidak memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel, yaitu Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015, Kota Subulussalam tahun 2015, Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2016, dan Kota Lhokseumawe tahun 2016.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam studi ini adalah analisis linier berganda (multiple linier regression), karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Berikut Persamaan regresi yang dipakai:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Tingkat pengungkapan LKPD
α	= konstanta
$b_1b_2b_3b_4b_5$	= Koefisien regresi
X_1	= Ukuran pemerintah daerah
X_2	= tingkat kemandirian daerah
X_3	= penerimaan dari pemerintah pusat
X_4	= ukuran legislative
X_5	= temuan audit
ϵ	= error term

Operasioan Variabel**Variabel Dependen**

Studi ini menggunakan taraf penyajian wajib LK pemda sebagai variabel dependen. Tingkat penyajian LKPD ialah perbandingan antara penyajian yang sudah disajikan dalam LK Pemda dengan penyajian yang seharusnya diungkapkan didalam CaLK berdasarkan SAP yang tertuang dalam PP Nomor 71 2010. Tingkat penyajian LKPD ini menjadi gambaran seberapa besar taraf penyajian telah dilakukan oleh pemda dibandingkan dengan penyajian wajib yang harus disajikan. Studi ini mengukur tingkat penyajian menggunakan sistem score, sejalan dengan yang pernah dilakukan Lesmana (2010). Dalam penelitiannya.

Variabel Independen

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran ialah sesuatu hal yang menggambarkan nominal atau skala yang digunakan untuk menggambarkan kecil atau besarnya sebuah objek. Aset dinyatakan dalam bentuk rupiah, total aset bisa dilihat didalam neraca yakni jumlah lancar dan non lancar. Ukuran pemda yang diprosikan dengan total aset dalam studi ini diadopsi dari studi Suhardjanto dan Lesmana (2010).

2. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kesanggupan pemda didalam mendanai sendiri kegiatannya kepada publik yang sudah membayar pajak serta retribusi sebagai pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah, (Halim, 2007 dalam Imawan, 2014). Variabel bebas ini diukur dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan

Transfer ditambah Total Kewajiban. Rumus rasio yang digunakan mengacu pada penelitian Maulana (2015).

3. Penerimaan dari Pemerintah Pusat

Terdapat tiga jenis pendapatan pemda, yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lainnya-lainnya pendapatan yang sah. Intergovernmental revenue atau penerimaan dari pemerintah pusat ialah pendapatan yang bersumber dari pusat atau dari provinsi. Sumarjo (2010) intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang didapat dari luar pemerintahan atau dari lingkungan eksternal dan menggambarkan besarnya ketergantungan pemda tersebut terhadap pemerintah pusat.

4. Ukuran Legislatif

Suatu lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan DPRD mempunyai fungsi pengawasan yakni mengawasi jalan pemerintahan sehingga selalu sinkron dengan harapan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan serta pelaporan informasi financial pemda sehingga tercipta keadaan pemda yang transparan dan akuntabel (Rahayu, 2016). Dalam studi ini ukuran legislatif diukur dengan melihat jumlah anggota DPRD yang dimiliki oleh setiap pemerintahan, maka diharapkan dengan semakin banyaknya jumlah anggota DPRD dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyajian LK yang dilakukan oleh pemda

5. Temuan Audit

Temuan audit adalah kasus-kasus yang ditemui oleh BPK didalam sebuah LK berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai bentuk kecurangan (Hendriyani & Tahar, 2015). Temuan audit yang diberikan oleh BPK terhadap LK setiap pemerintah didasari oleh hasil pemeriksaan atas kinerja LKPD, SPI, dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit findings dalam studi ini dihitung dengan banyaknya jumlah audit findings yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI

4. Hasil Dan Pembahasan
Deskripsi Penelitian

Tabel 1
Hasil analisis statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pengungkapan LKPD	65	37,74	66,04	48,27	6,432
Ukuran Pemerintah Daerah Kemandirian	65	27,69	29,42	28,33	0,388
Penerimaan dari pemerintah pusat	65	0,0	0,3	0,09	0,043
Ukuran Legislatif	65	0,36	0,79	0,60	0,088
Temuan Audit	65	20,00	45,00	28,66	7,786
Valid N (listwise)	65	7,00	24,00	14,43	3,807

Sumber: Data Sekunder (diolah) 2019

Analisis statistik deskriptif dipakai guna memberi gambar statistik atas variabel terikat dan variabel bebas.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Bahwa uji KS memiliki signifikansi sebesar 0,175. Dari hasil tersebut membuktikan hasil signifikansi > 0,05 ($\alpha=5\%$). Kesimpulannya model regresi terdistribusi normal, maka asumsi uji normalitas sudah dipenuhi.

Uji Multikolinieritas

Diketahui nilai tolerance variabel independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF kecil dari 10. Kesimpulannya adalah model regresi variabel independen tidak terdapat multikolinieritas dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2

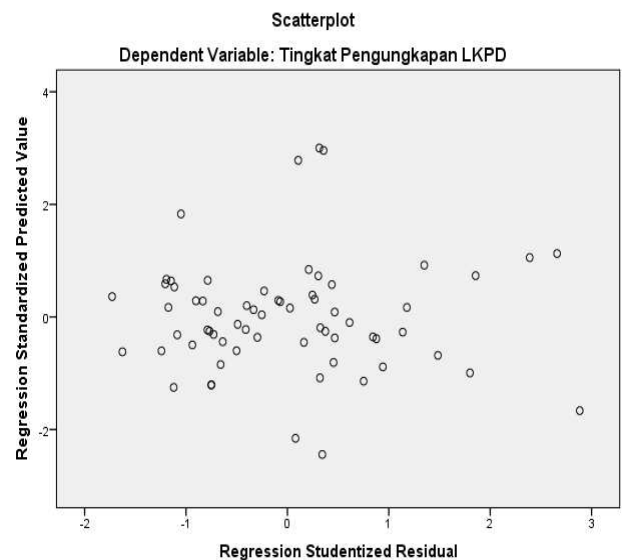
Du	Dw	4-Du	Keterangan
1,667	1,983	2,333	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Sekunder (diolah) 2019

Berdasarkan tabel diatas kesimpulannya data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan grafik scatterplot, terlihat bahwa data tersebar secara acak, yang menggambarkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Prediksi Tanda	Koefisien Regresi	Sig	Keterangan
Contant		133,207		
Ukuran pemerintahan	Negatif	-1,979	0,452	Tidak Signifikan

Variabel Independen	Prediksi Tanda	Koefisien Regresi	Sig	Keterangan
Kemandirian	Positif	7,670	0,678	Tidak Signifikan
Penerimaan dari Pemerintah Pusat	Negatif	-27,087	0,001	Signifikan
Ukuran Legislatif	Negatif	-0,122	0,229	Tidak Signifikan
Temuan Audit	Negatif	-0,667	0,001	Signifikan
Variabel Dependen	Tingkat Pengungkapan LKPD			
R Square	0,423			
Sig. F	0,000			

Sumber: Data Sekunder (diolah) 2019

Model analisis regresi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Data diolah dengan menggunakan software SPSS. Berikut hasilnya:

$$Y = 133,207 - 1,979X_1 + 7,670X_2 - 27,087X_3 - 0,122X_4 - 0,667X_5$$

Koefisien Determinasi

Pengaruh variabel bebas atas variabel terikat menghasilkan nilai R Square, nilai R Square sebesar 0,423, maka b variabel bebas memberikan perubahan terhadap variabel terikat sebesar 42,3%.

Pengujian Hipotesis

1) Uji Hipotesis (Uji F)

Hasil uji menunjukkan taraf probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$. Model regresi yang dipergunakan layak untuk menguji data dan bisa dikatakan bahwasanya variabel bebas secara simultan memberikan pengaruh atas variabel terikat

2) Uji Hipotesis (Uji Parsial)

a) Variabel independent ukuran pemda mempunyai probabilitas signifikansi $0,452 > 0,05$. Nilai koefisien yang dihasilkan negatif 1,979. Artinya hipotesis satu ditolak dengan kata lainnya ukuran pemda tidak memberikan pengaruh atas tingkat penyajian.

b) Variabel independen kemandirian mempunyai probabilitas signifikansi $0,678 > 0,05$. Nilai koefisien yang dihasilkan 7,670. Artinya hipotesis ditolak dengan kata lainnya kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat penyajian.

c) Variabel independen penerimaan dari pemerintah pusat mempunyai probabilitas signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai koefisien yang dihasilkan negative 27,087. Artinya

hipotesis ditolak dengan kata lainnya penerimaan dari pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan atas tingkat penyajian

d) Hasil uji parsial variabel ukuran legislative mempunyai probabilitas signifikansi $0,299 > 0,05$. Nilai koefisien yang dihasilkan negatif 0,122. Artinya hipotesis ditolak, atau ukuran legislatif tidak memberikan pengaruh atas tingkat penyajian

e) Uji parsial variabel bebas temuan audit mempunyai probabilitas signifikansi $0,001 < 0,05$. koefisien yang dihasilkan negatif 0,667. Artinya hipotesis ditolak dengan kata lainnya audit findings berpengaruh negatif dan signifikan terhadap taraf penyajian.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Ukuran pemda tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat penyajian LKPD. Penelitian ini selaras dengan Setyaningrum (2012) dan Lesmana (2010). Ukuran pemerintahan yang besar mempunyai sistem birokrasi yang lebih kompleks dibanding dengan ukuran pemerintahan yang kecil, maka dalam hal melakukan kontrol atas pengelolaan aset pemerintah tersebut akan jauh lebih sukar, sehingga menyebabkan besarnya kemungkinan kesalahan dalam melakukan pencatatannya atau tidak tepat.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kemandirian tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat penyajian LKPD, ini konsisten dengan yang dilakukan Ratnasari (2016). Tingginya kemandirian menunjukkan semakin mandiri pemda

tersebut dalam meendanai sendiri segala kegiatannya, alhasil taraf ketergantungan terhadap pihak eksternal menjadi turun.

Pengaruh Penerimaan dari Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Penerimaan dari pemerintah pusat memberikan pengaruh signifikan atas tingkat penyajian LKPD. Arah pengaruh penerimaan dari pemerintah pusat terhadap LKPD adalah negatif, Hasil ini konsisten dengan penelitian Hendriyani & Tahar (2015) dan Setyaningrum & Syafitri (2012). Semakin tinggi pendapatan transfer justru tidak memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD.

Pengaruh Ukuran Legistalif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Secara parsial variabel ukuran legislatif tidak memberikan pengaruh yang signifikan atas tingkat penyajian LKPD. Sumarjo (2010) dalam penelitiannya mengatakan jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan fungsi-fungsi anggota dewan yang kurang dijalankan sebagai mana seharusnya.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Penyajian LKPD

Temuan audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat pengungkapan LKPD, studi ini konsisten dengan Martani (2012), dari penelitiannya ditemukan arah negative signifikan temuan audit atas tingkat pengungkapan. Arah negative disebabkan pemerintah daerah terbiasa untuk menyembunyikan pengungkapan informasi-informasi yang di anggap perlu saat mempunyai berbagai permasalahan yang berhubungan dengan akuntabilitas, yang biasanya berhubungan atas dokumentasi (Martani, 2012)

5. Kesimpulan Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

- a. Variabel impenden secara simultan memberikan pengaruh atas variabel dependen.
- b. Ukuran pemda tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat penyajian LKPD.
- c. Kemandirian daerah tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat pengungkapan LKPD.

- d. Penerimaan dari pemerintah pusat memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat penyajian LKPD pada.
- e. Ukuran legislatif tidak memberikan pengaruh atas tingkat penyajian LKPD.
- f. Temuan audit memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat penyajian LKPD

Keterbatasan

- a. Peneliti hanya mengambil sampel LKPD Kabupaten/Kota, sementara masih banyak jenis LKPD pemerintah lainnya, seperti LKPD Pemerintah Provinsi, LKPD Kementerian/Lembaga
- 3) Peneliti hanya berfokus pada penyajian wajib saja, sementara jenis engungkapan terbagi dua, yaiatu penyajian wajib & penyajian sukarela.
- b. Penghitungan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dihitung dengan melakukan checklist yang berdasarkan dari opini atau pertimbangan subyektif peneliti. Hal ini memungkinkan didapatnya hasil yang akan berbeda antara peneliti untuk sampel dan periode pelaporan LKPD Kabupaten/kota yang sama.

Saran

1. Studi setelah ini diharapkan bisa memakai sampel yang lebih luas, contohnya dengan menggunakan LKPD Kabupaten/Kota yang terdapat diseluruh provinsi Indonesia
2. Studi setelah ini diharapkan menambah variabel berupa faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh atas tingkat penyajian LKPD, misalnya jumlah penduduk, jumlah SKPD dan lainnya-lainnya. Untuk audit findings misalnya berupa nominal penyimpangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada pengungkapan wajib (mandatory disclosure), melainkan juga berfokus pada pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).

Daftar Pustaka

- BPKRI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018.
- Choiriyah, U. (2010). *Information GAP Pengungkapan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

- Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Penerbit Ray.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia, 22(1), 25–33.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Imawan, R. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Universitas Negri Semarang.
- Khasanah, N. L. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 3, 1–11.
- Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Universitas Indonesia.
- Martani, D., & Liestiani, A. (2012). Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia, *Global Review of Accounting Finance* Vol. 3 No. 1. March 2012.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Pandasari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Volume XIX*.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi, 2, 37–46.
- Rahayu, A., & Mardiana, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kopleksitas, dan Temuan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan, 169–192.
- Ratnasari, A. D. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1–25.
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan , Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 1007–1049(2013).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Busniness*. New York: Jhon Wiley & Sons LTD.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Setyowati, L. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 6(April), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia, 30(1), 54–70.
- Suhardjanto, D., & Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan wajib Di Indonesia.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia), 8, 1–94.
- Sukmaningrum, T. (2012). *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten*

Dan Kota Semarang). Universitas
DIPONEGORO SEMARANG.

Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah.*

Susbiyani dan Purnomosidhi (2014). *The
Compliance with Mandatory Disclosure of
Financial Statement. A Study from Local
Government in Indonesia.* Journal of Finance
and Accounting, Desember, Vol. 5, No. 10,
2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan